



PENINGKATAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENCAPAI VISI POROS MARITIM DUNIA

*(Enhancement of The Indonesian National Defense Industry to Achieve The Vision of The
World Maritime Axis)*

Mayang Agnezia Parasasti, R. Thesalonika Yulyanti, Amanda Mary K Palar
Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Universitas
Pertahanan RI

Email: (mayangagnez11@gmail.com, rizkythesalonika@gmail.com,
amandamkpalar@gmail.com)

Abstrak

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*The biggest World Archipelagic State*) dan didukung dengan letak geografisnya yang strategis, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Untuk mencapai visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka harus didukung oleh implementasi Strategi Maritim yang komprehensif. Luas lautan Indonesia yang sangat besar serta berbagai ancaman yang ada membutuhkan penanganan dan kemampuan militer yang baik. Pada era kontemporer saat ini, Strategi Maritim modern telah melibatkan kekuatan udara, laut dan darat yang beroperasi Bersama. Oleh karenanya, untuk mencapai kekuatan yang besar dibutuhkan penguatan Industri pertahanan dan ketersediaan Alutsista yang jauh lebih modern dan lengkap.

Kata Kunci: Strategi Maritim, Poros Maritim Dunia, Industri Pertahanan Nasional, Alutsista.

Abstract

As the largest archipelagic country in the world (The biggest World Archipelagic State) and supported by its strategic geographical location, Indonesia has enormous potential to become the World Maritime Axis. To achieve Indonesia's vision as a World Maritime Axis, it must be supported by the implementation of a comprehensive Maritime Strategy. Indonesia's vast ocean area and the various threats that exist require good handling and military capabilities. In today's contemporary era, the modern Maritime Strategy has involved air, sea and land powers operating together. Therefore, to achieve



great strength, it is necessary to strengthen the defense industry and the availability of a much more modern and complete Alutsista.

Keywords: *Maritime Strategy, World Maritime Axis, National Defense Industry, Alutsista.*

1. Pendahuluan

Sebagai cerminan dari letak geografis Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan, fakta Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*The biggest World Archipelagic State*), serta didukung oleh posisi geostrategis Indonesia yang berada pada persilangan antara dua samudera serta dua benua (Limbong, 2015), dan kepemilikan atas berbagai sumber daya potensial yang ada maka, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi Poros Maritim Dunia (Mustari, Supartono, & Barnas, 2018).

Pemerintah Indonesia sendiri telah merancang konsep PMD ini dengan menjabarkannya dalam beberapa Pilar kebijakan yang di dalamnya mencakup: (a) Pembangunan Kembali budaya maritim di Indonesia; (b) Memberikan prioritas terhadap pembangunan berbagai infrastruktur beserta konektivitas maritim melalui pembangunan tol laut, logistik, *deep seaport*, pariwisata maritim, serta industri pertahanan; (c) Pembangunan *maritime power*, sebagai upaya untuk menjaga keamanan maritim serta keselamatan/kegiatan pelayaran; (d) Implementasi diplomasi maritim, melalui peningkatan kerja sama di bidang maritim serta upaya penanganan berbagai sumber konflik dan ancaman seperti pelanggaran kedaulatan, sengketa batas wilayah, pencurian ikan, *piracy*, serta pencemaran laut; (e) Penjagaan terhadap sumber daya laut, serta menciptakan kedaulatan pangan nasional dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama (Kemenko Bidang Kemaritiman RI, 2017).

Dalam rangka mencapai visi nasional Indonesia menjadi PMD, maka harus didukung oleh implementasi Strategi Maritim yang komprehensif. Strategi Maritim merupakan dimensi yang menjadi urgen untuk melaksanakan perencanaan militer



suatu negara, karena negara menyediakan sarana, tujuan dan langkah strategis untuk menerapkan kekuatan ke wilayah yang diinginkan. Implementasi Strategi Maritim ini juga dihadapkan oleh situasi keamanan maritim (*Maritime Security*) yang secara global menjadi sebuah isu yang terus mengalami perkembangan dalam beberapa dekade terakhir. Untuk menjelaskan konsep keamanan maritim ini dibutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai lingkup (domain) maritim yang terdiri atas berbagai aspek seperti: ekonomi, politik, militer, sosial dan budaya sehingga dapat tercapainya kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Keamanan maritim dapat dipahami sebagai *“an important indicator how a state safeguards its national interest, as it is connected to economic development, sovereignty, political stability in the region, and freedom navigation”* (Octavian, 2018). Secara umum, terdapat beberapa tantangan dan isu keamanan maritim era kontemporer yang mencakup: (a) *piracy an armed robbery*, (b) *maritime terrorism*, (c) *cargo theft*, (d) *small arms and light weapons trafficking*, (e) *human trafficking*, (f) *global climate change*, serta (g) *illicit trafficking by sea (ex: narcotics trafficking)*. Tantangan tersebut juga terus mengalami perkembangan sepanjang waktu dan termanifestasi dalam berbagai bentuk lainnya.

Sebagai salah satu komponen utama dalam mengatasi masalah keamanan maritim di Indonesia, TNI AL harus mampu menjadi ujung tombak bagi negara untuk mencapai pertahanan dan keamanan maritim nasional. Pertahanan negara yang kuat akan berimplikasi besar terhadap terlindunginya kedaulatan negara dari berbagai ancaman yang ada. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki daerah yang luas serta terdiri dari banyak pulau. Sehingga untuk dapat mencapai visi Indonesia sebagai PMD, maka dibutuhkan penguatan Industri pertahanan nasional dengan teknologi alutsista yang lebih maju serta dapat dikendalikan dari jarak jauh (LIPI, 2013).

Dalam rangka untuk menciptakan lingkungan strategis serta memperkuat isu-isu keamanan maritim, maka Indonesia harus dapat melakukan transformasi ekonominya, dari negara berkembang menjadi sebuah negara yang berbasis industri. Perumusan strategi maritim Indonesia tersebut harus didukung oleh kemampuan



untuk mengamankan berbagai upaya kepentingan nasional Indonesia (Prabowo, 2013). Untuk dapat mencapai kejayaan Indonesia, maka harus adanya prioritas strategi pembangunan maritim nasional (Kusumastanto, 2022).

Sebagai langkah awal dalam implementasi Visi Poros Maritim Dunia, maka percepatan pembangunan kelautan harus dicapai sebagai upaya untuk tercapainya kesejahteraan bagi segenap masyarakat Indonesia. Visi poros maritim dunia sendiri harus dirumuskan secara lebih jelas melalui peran, potensi, dan peluang yang dimiliki Indonesia. Luasnya berbagai unsur kemaritiman membutuhkan adanya prioritas dan diferensiasi yang harus dipilih berkenaan dengan aspek/dimensi apa yang dijadikan sebagai fokus untuk digarap (Kemenko Bidang Kemaritiman RI, 2017).

Maka, berdasarkan penjabaran mengenai strategi maritim dan visi PMD Indonesia di atas. Artikel ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai pentingnya peran dari penguatan Industri pertahanan nasional serta bagaimana kondisi Alutsista yang dimiliki Indonesia akan berimplikasi terhadap pencapaian strategi maritim dan visi nasional Indonesia sebagai PMD.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Strategi Maritim

Sebagai sebuah negara kepulauan, dan fakta bahwa Indonesia berada di letak geografis yang sangat strategis maka pertahanan keamanan di dalam domain maritim sangatlah penting untuk ditegakan. Jika dilihat berdasarkan aspek pertahanan militer, dalam implementasinya TNI AL melakukan berbagai operasinya melalui *two basic strategy*, mencakup: (1) Kontrol atas sektor maritim (*maritime control*), dan (2) Proyeksi kekuatan (*force projection*) (Setiadji, 2017). *Maritime strategy (military)*, terdiri atas 3 elemen penting yang saling terkait untuk mencapai kepentingan nasional dan penegakan keamanan di laut. Ketiga elemen tersebut mencakup:

- a. *Means*, merupakan sarana dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mencapai strategi maritim yang telah ditetapkan. *Means* ini mencakup: (a)



- Proyeksi kekuatan, (b) Modernisasi Alutsista, (c) Kesiapan Pemerintah, serta (d) Keberlanjutan pembangunan (Ampun & Purba, 2021).
- b. *Ways*, merupakan cara atau dapat dipahami sebagai konsep strategik yang mencakup bagaimana cara mencapai suatu tujuan dengan menggunakan berbagai instrumen seperti: *Mobility, and Ready on Arrival*. Dalam rangka memperkuat industri pertahanan national dan alutsista dapat dilakukan dengan mencari dan menganalisis fakta-fakta yang ada dalam; (1) Bagaimana keseimbangan kekuatan (*balance of power*) yang ada di wilayah asia pasifik, dan (2) Perkembangan teknologi kapal bawah laut dan alutsista di kawasan asia pasifik (Ampun & Purba, 2021).
- c. *Ends*, menjelaskan Apa yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dapat terefleksi melalui kemampuan suatu negara untuk melakukan proyeksi kekuatan (*power projection*), komando laut (*command of the sea*), kontrol atas laut (*sea control*), penolakan laut (*sea denial*), pencegahan (*deterrence*), kesiapan armadanya (*fleet in being*). Fakta bahwa wilayah lautan yang dimiliki oleh Indonesia sangat luas, serta didukung oleh letak geopolitik dan geostrategisnya yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur perdagangan global yang cukup padat, maka jika tidak dilakukan pengawasan yang tepat hal ini dapat menyebabkan konflik terbuka dan berbagai ancaman lainnya (Ampun & Purba, 2021).

Pada era kontemporer saat ini, *modern maritime strategy* telah mengintegrasikan unsur-unsur kekuatan lainnya seperti: (a) kekuatan darat, (b) kekuatan laut, dan (c) kekuatan udara, yang dioperasikan secara bersama. Oleh karenanya, untuk mencapai kekuatan yang besar dibutuhkan penguatan Industri pertahanan dan ketersediaan Alutsista yang jauh lebih modern dan lengkap. Karena, strategi maritime kontemporer tidak lagi hanya mencakup kekuatan dan strategi yang dimiliki oleh AL suatu saja (Parliament of Australia, 2018).



2.2. Perkembangan Teknologi Militer Global

Jalannya peperangan serta berbagai jenis ancaman telah semakin berkembang serta bertransformasi cukup signifikan, sehingga berimplikasi terhadap perkembangan teknologi dan industri militer global. Sepanjang sejarah, perang telah melibatkan berbagai aspek, utamanya adalah bagaimana keunggulan teknologi yang dimiliki oleh sebuah negara melalui kepemilikan dan kemampuan industri pertahanannya. Berbagai kondisi ini kemuan akan memiliki peran yang sangat besar terhadap berlangsungnya sebuah peperangan.

Di era saat ini, bidang teknologi dan industri pertahanan global sedang berada dalam transisi perang generasi empat ke perang generasi kelima. Secara umum, dalam peperangan generasi kelima memiliki karakteristik dan juga transisi yang telah melibatkan teknologi persenjataan yang lebih canggih serta perubahan yang signifikan dalam gelar perang. Peperangan di masa ini, berfokus pada dampak secara psikologis yang dihasilkan terhadap pihak lawan (baik dampaknya kepada pemerintah maupun rakyatnya). Sehingga dalam level strateginya, mobilisasi pasukan yang besar tidak lagi dijadikan sebagai pilihan strategi utama.

Jalannya perang saat ini sangat bergantung pada kemampuan pasukan khusus dalam jumlah kecil yang memiliki kekuatan besar. Fokusnya juga telah berubah menjadi ke ranah *cyber space*, yang tetap memiliki dampak terhadap fisik seperti kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lawan. Kondisi inilah yang menyebabkan pentingnya suatu negara untuk memiliki system dan kemampuan alutsista serta sumber daya manusia yang kuat sebagai upaya menghadapi transformasi karakteristik perang kontemporer. Saat ini, dengan dinamika lingkungan keamanan strategis yang terefleksi melalui kompleksitas ancaman transnasional serta lahirnya aktor-aktor non-state maka, setiap negara khususnya Indonesia harus mampu untuk merespon situasi ini dengan mengadopsi berbagai teknologi baru yang sangat penting bagi stabilitas keamanan nasional (Rachmat, 2014).



3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penjelasan deskriptif naratif. Melalui analisis kualitatif, peneliti menggunakan berbagai data yang beririsan dengan permasalahan yang diangkat melalui analisis data non numerik. Topik yang dikaji dalam penelitian ini akan disajikan melalui gambaran serta narasi berdasarkan data dan fakta yang ada mengenai strategi maritim Indonesia dalam perspektif kerja sama bidang industri pertahanan.

Peneliti menggunakan jenis dan sumber data sekunder, yang diperoleh dari berbagai hasil kajian Pustaka serta interpretasi dan perspektif peneliti berdasarkan berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, makalah, serta bahan dari sumber internet lainnya (Sugiyono, 2019). Kajian penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori Strategi Maritim, Kerja sama Pertahanan, dan Konsep Poros Maritim Dunia yang dikembangkan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beberapa teori dan konsep tersebut nantinya akan membantu peneliti dalam mengkaji dan memberikan analisis terhadap Strategi Maritim Indonesia dalam Mencapai Visi PMD melalui Kerja sama Industri Pertahanan Nasional.

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Kondisi Sistem Pertahanan Nasional

Jalannya peperangan di era kontemporer saat ini telah mengalami cukup banyak transformasi karena berbagai ancaman baru yang semakin kompleks serta respon terhadap perkembangan teknologi dan industri militer global. Keunggulan dan sistem persenjataan, kemampuan teknologi serta kapabilitas industri pertahanan yang dimiliki oleh sebuah negara akan sangat menentukan keunggulan yang dimiliki serta mempengaruhi jalannya peperangan.

Perubahan dalam sebuah peperangan didasarkan oleh beberapa aspek seperti: (1) Kondisi medan peperangan, (2) Aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, (3) Bagaimana



jalannya peperangan, (4) Kondisi medan perang, serta (5) Tujuan dan kemenangan seperti apa yang ingin dicapai. Perkembangan teknologi dan industri pertahanan telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap jalannya perang. Hal ini kemudian melahirkan karakteristik jenis perang baru (Lind, 1989).

Terjadinya embargo persenjataan yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1990-an, berimplikasi terhadap kesulitan bagsa Indonesia dalam melakukan modernisasi alutsista. Saat ini, kondisi alutsista yang dimiliki oleh Indonesia cukup mengkhawatirkan. Sebagian besar Alutsista yang dimiliki oleh TNI memiliki rentan usia sekitar dua puluh lima sampai empat puluh tahun, perawatan serta perbaikannya terus dilakukan sehingga kelak dapat tetap digunakan (Bakrie, 2007). Fakta ini menunjukkan bahwa secara postur kekuatan, kemampuan persenjataan yang dimiliki oleh TNI masih jauh dari standar, serta masih belum memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia.

Selain itu juga, kondisi saat ini menunjukkan bahwa, untuk tercapainya keamanan wilayah Indonesia, TNI AL belum memiliki armada yang cukup. Sebagai sebuah negara maritim terbesar, Alusista yang dimiliki oleh TNI AL pun belum cukup memadai untuk membentengi wilayah laut Indonesia. Implikasinya adalah, keamanan laut Indonesia menjadi sangat rentan terhadap berbagai ancaman yang ada.

Luas lautan Indonesia yang sangat besar serta berbagai ancaman yang ada membutuhkan penanganan dan kemampuan militer yang lebih canggih dan modern. Adapun tren yang muncul saat ini adalah perlombaan yang dilakukan oleh berbagai negara untuk membangun kekuatan Angkatan lautnya hingga ke tingkat *blue waters navy*. Sehingga untuk mencapainya, Indonesia membutuhkan penguatan Industri pertahanan nasional yang didukung oleh kerja sama pertahanan yang komprehensif.



4.2. Strategi Maritim Indonesia Untuk Mencapai Visi Poros Maritim Dunia melalui Penguatan Industri Pertahanan Nasional

Membangun kekuatan pertahanan maritim Indonesia merupakan tahapan rencana yang dilakukan dengan cara-cara tertentu (*ways*), melalui sarana dan prasarana yang dibutuhkan (*means*), yang berupa pembangunan kekuatan pertahanan maritim sebagai upaya implementasi strategi pertahanan maritim nasional, serta ditujukan untuk mencapai tujuan pertahanan nasional (*ends*). Secara umum, pembangunan dalam kekuatan pertahanan di sektor maritim, meliputi 3 aspek penting, yaitu: (a) personel, (b) struktur kekuatan, dan (c) konsep.

Perkembangan teknologi, perubahan ancaman, serta berbagai tuntutan tugas yang ada akan memiliki implikasi yang besar terhadap konsep operasional yang digunakan untuk mencapai kekuatan pertahanan maritim yang disesuaikan dengan strategi maritim nasional. Adapun dasar pengembangan konsep operasional dalam strategi maritim mencakup implementasi latihan serta evaluasi yang dilakukan secara kontiniu.

Perlunya keamanan laut secara menyeluruh melalui kehadiran berbagai elemen kekuatan TNI AL untuk menjamin pemanfaatan dan penguasaan potensi laut untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia dan mencegah pemanfaatan laut oleh pihak lawan, maka Indonesia harus mampu menguasai laut dan ruang udara di atas seluruh perairan Indonesia. Perlengkapan (sarana) infrastruktur yang diperlukan untuk pengelolaan maritim yang harus dimiliki oleh TNI AL serta berbagai unsur/instansi terkait di bidang maritim mencakup: (a) kapal laut, (b) pesawat terbang, (c) radar pantai, (d) pelabuhan dengan segala perlengkapannya, dan (e) perlengkapan komunikasi. Keberhasilan pengelolaan maritim ini terutama ditentukan oleh kemampuan mendeteksi, memantau, mengarahkan dan menindak pelanggaran kapal di laut.

Sebagai upaya Indonesia untuk menciptakan serta mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, maka dibutuhkan penguatan industri pertahanan nasional.



Kehadiran industri pertahanan yang mandiri sangat dibutuhkan dalam rangka penyediaan kualitas dan kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik wilayah Indonesia, serta sebagai langkah efektif dalam menghilangkan ketergantungan politik terhadap negara lain. Jika merujuk pada negara Tiongkok dan India, maka dapat dilihat bahwa pembangunan sistem pertahanan serta modernisasi alutsista telah terbukti secara efektif dapat memperkuat kemampuan pertahanan dan keamanan negara dalam menghadapi berbagai ancaman dan dinamika lingkungan strategis yang ada melalui pembinaan industri pertahanan domestik, yang saat ini terefleksi bahwa kedua negara tersebut dapat bertransformasi menjadi kekuatan militer terbesar di kawasan Asia. Sehingga, sebagai langkah awal komitmen pemerintah terhadap pengembangan Industri pertahanan nasional, maka Indonesia saat ini tengah melakukan akselerasi program yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan *Minimum Essential Force (MEF)* yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Implikasi utama hubungan antara perkembangan dan kemajuan industri pertahanan dalam negeri dengan misi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 adalah sebagai berikut: (1) Terwujudnya kemandirian dalam penyediaan peralatan pertahanan dan keamanan, (2) Terwujudnya industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif, serta (3) Meningkatkan kemampuan pembuatan alutsista dan jasa pemeliharaan yang digunakan sebagai bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal (UU No. 16, Pasal 3 Tahun 2012).

Saat ini, sektor pertahanan Indonesia mengoperasikan beberapa industri strategis, antara lain: PT. Pindad, PT. PAL dan PT. Dirgantara Indonesia. Meskipun ketiga perusahaan ini memiliki sejarah panjang dalam pembuatan sistem pertahanan, namun belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara secara keseluruhan. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Dengan munculnya embargo senjata



yang diberlakukan oleh Amerika Serikat pada awal 1990-an, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya keberadaan dan kemampuan berbagai industri pertahanan strategis tersebut terhadap sistem pertahanan.

Selain itu, sebagai pemain baru dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri, maka Indonesia perlu bekerja sama di bidang pertahanan terutama dengan banyak negara maju. Salah satu bentuk kegiatan industri pertahanan tersebut adalah *co-development*, yaitu sebuah program bersama antara pemerintah dan perusahaan multinasional yang mengembangkan dan memproduksi alutsista, meliputi evaluasi penjualan, *cost sharing*, dan *profit sharing* produksi senjata (Perwita, 2013).

Pemerintah Indonesia terus berupaya memasukkan klausul alih teknologi dalam pengembangan kerja sama pertahanan dengan negara lain dalam rangka pengembangan alutsista. Melalui alih teknologi (*ToT*) ini, diharapkan industri pertahanan dapat secara mandiri mengimplementasikan dan memproduksi senjata sesuai standar yang diberikan. Hal ini tampaknya tidak menjadi kendala besar, karena industri pertahanan dalam negeri saat ini berkembang sangat baik.

Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan wilayah perbatasan Indonesia, maka dibutuhkan penguatan TNI AL. hal ini karena, TNI AL Indonesia memiliki tempat strategis untuk mengupayakan optimalisasi implementasi visi maritim dunia. Beberapa hal penting yang dapat dilakukan untuk mempercepat pemerintah mencapai visi tersebut adalah dengan melakukan berbagai operasi melalui dukungan dari Alutsista yang canggih akan, serta melakukan kerja sama pertahanan melalui *naval diplomacy* secara efektif. Beberapa upaya lain yang dapat dilakukan adalah: *modernization*, *build up*, dan *naval deployment*. Selain itu juga, berbagai dinamika lingkungan strategis harus dapat direspon oleh Indonesia secara cepat dan tanggap dalam rangka mewujudkan visi poros maritim dunia (Zulham & Maujana, 2019).

Di dalam pilar ketiga PMD membahas tentang Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Pulau. Untuk mencapai itu, diperlukan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan mengoordinasikan pengembangan ruang pertahanan



secara paralel. Tanpa dukungan sistem pertahanan laut yang baik, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau tidak akan berjalan dengan baik.

Penguatan industri pertahanan nasional merupakan cara (*ways*) bagi bangsa Indonesia untuk dapat mencapai visi nasional sebagai poros maritim dunia (*ends*). Untuk mencapai ketujuh pilar yang ada dalam konsep PMD, maka pemerintah Indonesia harus mengoptimalkan keseluruhan sumber daya dan sarana prasarana yang ada (*means*), melalui perancangan dan implementasi sebuah kebijakan nasional yang mengupayakan penguatan industri pertahanan yang ada.

5. Kesimpulan

Membangun kekuatan pertahanan maritim Indonesia merupakan tahapan rencana yang dilakukan dengan cara-cara tertentu (*ways*), melalui sarana dan prasarana yang dibutuhkan (*means*), yang berupa pembangunan kekuatan pertahanan maritim sebagai upaya implementasi strategi pertahanan maritim nasional, serta ditujukan untuk mencapai tujuan pertahanan nasional (*ends*).

Industri pertahanan dalam negeri merupakan salah satu pionir upaya negara untuk mengembangkan sistem pertahanannya sendiri. Hal ini menjawab kebutuhan alutsista, baik dalam rangka penyediaan alutsista yang berkarakteristik regional dalam kualitas dan kuantitas alutsista, maupun dalam rangka menghilangkan ketergantungan politik terhadap negara lain.

Dalam rangka mewujudkan visi nasional Indonesia sebagai poros maritim dunia dibutuhkan modernisasi Alutsista yang dapat tercapai melalui penguatan industri pertahanan nasional. Melalui pendorongan penguatan industri nasional serta kerja sama pertahanan melalui diplomasi maritim diharapkan secara efektif akan dapat mewujudkan visi Indonesia untuk dapat menjadi poros maritim dunia (PMD). Selain itu juga, untuk mendukung penguatan industri pertahanan dibutuhkan kehadiran dan peran nyata dari pemerintah melalui sebuah kebijakan nasional ramah terhadap penguatan industri pertahanan nasional.



Daftar Pustaka

- Ampun, A. C., & Purba, A. O. (2021). STRATEGI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, NO. 3*, 321-325.
- Bakrie, C. R. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kemenko Bidang Kemaritiman RI. (2017). *Kebijakan Kelautan Indonesia*. Jakarta: Kemenko Marves Press.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia* . Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kusumastanto, T. (2022, June 28). *Arah Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim*. Retrieved from https://www.academia.edu/23732286/Arah_Strategi_Pembangunan_Indonesia_Sebagai_Negara_Maritim
- Limbong, B. (2015). *Poros Maritim*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Lind, W. S. (1989). The Changing Face of War: Into the Fourth Generation. *Marine Corps Gazette, Vol. 73, No. 10*, 22.
- LIPI. (2013). *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan RI*. Jakarta: LIPI Press.
- Mustari, B., Supartono, & Barnas, R. (2018). STRATEGI PERTAHANAN LAUT NUSANTARA DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta, Volume 4, Nomor 2*, 19.
- Octavian, A. (2018). Global Maritime Fulcrum and ASEAN. (p. 36). Jakarta: Seskoal Press.
- Parliament of Australia. (2018). *Maritime Strategy Concept*. Canberra: Parliament of Australia.
- Perwita, Anak Agung Banyu, et.al. 2013. *Pengantar Kajian Strategis*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Prabowo, E. E. (2013). Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik di Laut China Selatan). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 118-129.
- Prime Minister of Australia. (2021). *Australia To Pursue Nuclear Powered Submarines Through New Trilateral Enhanced Security Partnership*. Canberra: Australia Government.
- Rachmat, AN. (2014). Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global Bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia. Retrieved from:



https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=P4JaTnYAAAAJ&citation_for_view=P4JaTnYAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

- Sea Power Centre Australia. (2013). *What is a Maritime Strategy?* Canberra: Sea Power Centre Australia.
- Setiadji, A. (2017, June 30). Kekuatan Pertahanan Indonesia dalam Bingkai Negara Maritim. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, R. A. (2016). *Developing Indonesia's Maritime Strategy under President Jokowi*. Seoul: The Asan Forum.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan
- Zulham, M., & Maujana, H. (2019). Strategi Indonesia dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia di Tengah Kebijakan Jalur Sutera Maritim China. *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 4, Nomor 1, 59-60.